DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.

Djamal, Hidajanto., dan Andi Fachrudin, *Dasar-Dasar Penyiaran, Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi*, Kencana, Jakarat, 2011.

Effendy, Onong Uchjana, *Radio siaran, Teori & Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Effendy, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Karya CV, Bandung, 1986.

Effendy, Onong Uchjana, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerha atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1955.

Hidayat, Arief, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Abshor, Semarang, 2011.

Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, 1976.

Siregar, Ashadi, *Menyingkap Penyiaran Membaca Televisi Melihat Radio*, LP3Y, Yogyakarta, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UII Press, Jakarta, 1986.

Wahyudi, J.B, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, Kencana*, Jakarta, 1994.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Inonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan

Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi da/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari Departemen Penerangan dan Bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan Yang Telah Memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari Departemen Penerangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Format Peneyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informtika Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 20/Per/M.Kominfo/5/2008 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produksi Film Iklan Yang Disiarkan dan Dipertunjukan di Indonesia.

Peraturan KPI NO. 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan KPI NO. 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Peraturan KPI NO. 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan KPI.

Internet:

aset63.wordpress.com

www.kpi.go.id

www.kpid.jatengprov.go.id

www.deteksinusantara.com

id.m.wikipedia.org